

Diskursus Pangan, Ekofeminisme dan *Food Sovereignty* di Era COVID-19

Wahyu Eka Styawan

Universitas Brawijaya
wahyuekas@student.ub.ac.id

Abstract

During the COVID-19 pandemic, many sectors experienced shocks, not the food sector. In the food sector, there are still many problems facing difficulties from the presence of the COVID-19 wave. Some of the contributing factors are the transformation of agriculture from traditional to modern. Since the introduction of the green revolution, food has led to an intensification framework ranging from global agricultural food production and a focus on productivity, such as requiring farmers to grow monocultures. This condition causes land degradation, environmental degradation and biodiversity so that in the long term food security is threatened. Quantity-based intensification also causes local wisdom of farmers' agriculture, such as farmers' attachment to the ecosystem, the ability to produce local seeds, and the determination of subsistence factors, one of which is the barn system. On the other hand, besides having an impact on the ecological aspect, it also has an impact on gender, which in the end leads to women's injustice. Several notes in previous research have found that agricultural intensification resulted in a gender burden in farmer households, as well as an increased burden on female farmers. The disconnection of farmers from the ecosystem, the threat of ecological cracks and gender climate change, are links that cannot be separated, because they affect each other. This paper will describe and analyze the problem of food insecurity; pay attention to gender and ecological gaps using ecofeminism and food sovereignty approaches as an effort to reconstruct the existence of food insecurity; and learn from the experience of the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Food Sovereignty; ecofeminism; food security, ecology*

Pendahuluan

Pada tahun 2020 konsumsi beras diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 0,11% dan pada tahun 2021 akan ada penurunan sebesar 0,05%.¹ Prediksi permintaan beras pada tahun 2017-2019 untuk konsumsi mencapai 124,89 kg/kapita/tahun. Lalu, pada 2017 konsumsi beras diperkirakan mencapai 32,71 juta ton dan tahun 2019 akan mencapai 33,47 juta ton.² Meski ada penurunan laju konsumsi per kapita, tetapi ketergantungan pada beras menjadikan permintaan masih tinggi. Hal tersebut memicu kerentanan pada *food security*. Tergambar dari adanya penurunan hasil produksi padi sebanyak 2,63 juta ton (7,75%) pada tahun 2019 dari total 31,31 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2018.³

¹ Wahyuningsih, 'Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian' (2019) 09 Buletin Konsumsi Pangan 32.

² M Qadafi Khairuzzaman, 'Outlook Kementan 2016' (2016) 4 64.

³ BPS, *Executive Summary of Paddy Harvested Area and Production in Indonesia 2019* (2020) <<https://www.bps.go.id/publication/2020/07/10/32247632fa792a2f3f28a644/ringkasan-eksekutif-luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html>>.

Melihat persoalan *food security* di Indonesia khususnya saat COVID-19 melanda, Indonesia menjadi negara yang cukup rentan. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang tidak responsif dalam menghadapi COVID-19, seperti kacaunya distribusi pangan dan rentannya produksi pangan. Dampaknya saat karantina wilayah terjadi *panic buying* hingga kelangkaan beberapa bahan pangan pokok.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa pada situasi darurat terdapat sebuah faktor yang relasional dengan tidak meratanya distribusi pangan, sehingga mengakibatkan kelangkaan dan tidak teraksesnya pangan. Salah satu penyebab kondisi ini berkaitan dengan kebijakan pangan yang bias, karena terlalu menekankan pada satu komoditas, adanya alih fungsi lahan dan faktor menurunnya produksi pangan pasca revolusi hijau.⁵ Rendahnya potensi pertanian seringkali disebabkan oleh rusaknya tanah, menurunnya kesuburan dan kemiskinan.⁶ Rusaknya tanah dipengaruhi oleh retaknya unsur yang membuat tanah itu sehat, bersama dengan ketersediaan air, keduanya merupakan sumber daya yang paling berharga bagi manusia. Degradasi tanah menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Hal itu mengurangi hasil, memaksa petani untuk menggunakan lebih banyak input, dan pada akhirnya dapat menyebabkan pengabaian tanah.⁷

Degradasi tanah telah menjadi masalah yang sangat serius di berbagai dunia. Degradasi tanah menyebabkan penurunan produktivitas tanaman dan keberlanjutan ekonomi yang sangat besar, salah satunya menimbulkan kerugian, menempatkan keamanan pangan dan mata pencaharian petani dalam resiko rentan.⁸ Di sub-Sahara Afrika, tanah mengalami degradasi yakni penipisan unsur hara, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas tanaman, dan berdampak pada kelaparan dan kemiskinan.⁹ Hal tersebut juga terjadi di Amerika Selatan,¹⁰ dan juga di India di mana kesuburan tanah mulai menurun sehingga berdampak pada pembengkakan produksi pertanian yang tidak diimbangi dengan hasil pertanian yang stabil.¹¹ Terdapat pula persoalan degradasi tanah non-erosif di mana degradasi kualitas tanah tidak terkait dengan erosi. Ada enam faktor penyebab terjadinya degradasi tanah non-erosif yang mungkin ada di Indonesia yakni, 1. Pematatan dan pembakaran; 2. Pengapuran kesuburan tanah; 3. Kehilangan bahan organik tanah; 4. Pengasaman tanah; 5. Akumulasi senyawa toksik; 6. Pencemaran pertanian. Dari enam penyebab utama tanah degradasi non-erosif, ada tiga penyebab utama

⁴ Made Ayu Mariska, 'COVID-19 & Its Impacts: Is Indonesia Ready?' <<http://hdl.handle.net/11540/11920>>; Zuhud Rozaki, 'COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia' (2020); Djoko Puguh, Marthella Rivera and Muhammad Fazri, "Covid -19 : Menakar Ketahanan Pangan Di Desa ""

⁵ Khudori, 'Kondisi Pertanian Pangan Indonesia' (2010) 19 Pangan 211 <<http://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/141/127>>.

⁶ Meike Wollni and Camilla Andersson, 'Spatial Patterns of Organic Agriculture Adoption: Evidence from Honduras' (2014) 97 Ecological Economics 120.

⁷ Tiziano Gomiero, 'Soil Degradation, Land Scarcity and Food Security: Reviewing a Complex Challenge' (2016) 8 Sustainability 281.

⁸ Ranjan Bhattacharyya and others, 'Soil Degradation in India: Challenges and Potential Solutions' (2015) 7 Sustainability 3528.

⁹ Katherine Tully and others, 'The State of Soil Degradation in Sub-Saharan Africa: Baselines, Trajectories, and Solutions' (2015) 7 Sustainability 6523.

¹⁰ Ana B Wingeyer and others, 'Soil Quality Impacts of Current South American Agricultural Practices' (2015) 7 Sustainability 2213.

¹¹ Bhattacharyya and others (n 8).

yang sering terjadi pada lahan di Indonesia yaitu pemadatan, menurunnya kesuburan tanah dan hilangnya bahan organik.¹²

Selain berbicara terkait ancaman pangan yang didorong oleh faktor lingkungan yakni degradasi lahan pertanian, persoalan yang cukup serius terkait keterancamannya pangan juga disebabkan oleh alih fungsi lahan. Jika merujuk pada statistik pertanian nasional yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, luas lahan sawah (*wetlands*) yang memproduksi tanaman pokok seperti beras mengalami penurunan yang signifikan, tercatat pada tahun 2015 terdapat 8.092.907 hektar lahan, lalu pada tahun 2019 lahan sawah menjadi sekitar 7.463.948 hektar, artinya dalam kurun waktu empat tahun terdapat penyusutan lahan sebesar 628.959 hektar, jika dirata-rata dalam satu tahun terdapat 157.240 hektar lahan sawah yang hilang.¹³ Lebih jelasnya lagi bahwa penyusutan lahan pangan di Jawa mencapai 1 juta hektar, dengan rerata penyusutan 50.100 hektar per tahun atau 61,57 %. Penyusutan lahan itu pun mendorong hilangnya produksi pangan seperti pada dengan rasionalisasi 2,82 juta ton per tahun atau jika dikumulasikan mencapai 50,9 juta ton gabah.¹⁴

Tidak hanya alih fungsi lahan, ancaman soal pangan juga diakibatkan oleh perubahan iklim. Seperti yang diungkapkan oleh Wheeler dan Von Braun (2013) yang mengatakan perubahan iklim berpotensi mengganggu keamanan pangan, karena mengancam produksi dari tanaman pangan. Pola koheren yang dapat dilihat dari dampak perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman yaitu rawannya ketersediaan pangan. Stabilitas seluruh sistem pangan sangat berisiko di bawah perubahan iklim karena variabilitas pasokan jangka pendek. Selain itu perubahan iklim akan memperburuk kerawanan pangan di daerah yang saat ini rentan terhadap kelaparan dan kekurangan gizi.¹⁵

Mengenai persoalan akses dan pemanfaatan pangan secara tidak langsung terpengaruh melalui efek sampingan perubahan iklim, seperti pada pendapatan rumah tangga dan individu, lalu pada konteks pemanfaatan pangan dapat terganggu oleh hilangnya akses terhadap air minum dan kerusakan kesehatan. Secara lebih rinci perubahan iklim turut mendorong gagal panen hingga penurunan nutrisi pada tanaman pangan, seperti buah dan sayuran, terutama pada sistem tanam tahunan.¹⁶ Penelitian terbaru di Indonesia, terutama yang berkaitan dampak perubahan iklim yang berpengaruh pada tanaman pangan pokok seperti beras dilakukan di Lampung. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hasil produksi padi Ciherang berkurang dalam semua skenario iklim, terutama karena suhu udara yang lebih tinggi menyebabkan penurunan laju fotosintesis, peningkatan laju respirasi, dan perubahan fenologis seperti percepatan penuaan.¹⁷

Dampak dari degradasi dan alih fungsi lahan selain persoalan produktivitas pangan, juga memiliki keterhubungan dengan persoalan ketimpangan gender. Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja, menurut penelitian dari Ngadi dkk (2001) dari total 82.613

¹² Santun RP Sitorus and Andrea Emma Pravitasari, 'Land Degradation and Landslide in Indonesia' (2017) 1 *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education* 61.

¹³ Kementerian Pertanian, 'Statistik Lahan Pertanian Tahun 2013-2017' 1
<<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/167-statistik/statistik-lahan>>.

¹⁴ Iwan Isa, 'Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian', *Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian*. A. Dariah, NL Nurida, E. Husen. F. Agus (editor), Bogor (2006).

¹⁵ Tim Wheeler and Joachim Von Braun, 'Climate Change Impacts on Global Food Security' (2013) 341 *Science* 508.

¹⁶ Courtney P Leisner, 'Climate Change Impacts on Food Security-Focus on Perennial Cropping Systems and Nutritional Value' (2020) 293 *Plant Science* 110412.

¹⁷ Yoshiyuki Kinose and others, 'Impact Assessment of Climate Change on the Major Rice Cultivar Ciherang in Indonesia' [2020] *Journal of Agricultural Meteorology D*.

pekerja dengan 31.256 pekerja di antaranya dari sektor pertanian, 14.835 pekerja dari sektor manufaktur dan 36.522 pekerja dari sektor jasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi tenaga kerja laki-laki terjadi di semua sektor yang diteliti tersebut dengan proporsi tenaga kerja perempuan lebih minim. Dari ketiga sektor tersebut proporsi pekerja perempuan terendah ada pada sektor industri pengolahan (27,1%) diikuti sektor pertanian (37,5%) dan jasa (46,5%).¹⁸ Tidak tesorapnya perempuan dalam ruang kerja, selain karena faktor budaya dan pendidikan, juga disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian. Sebab alih fungsi mendorong kurangnya lahan garapan, dengan masih adanya *gender gap* yang kuat, maka dominasi laki-laki dalam mengatur dan mengelola lahan menjadi sangat dominan.¹⁹ Hal ini akan merembet juga pada pangan dan kemampuan keluarga dalam menyediakan kebutuhan pangan.²⁰ Karena lahan yang menyempit, penghasilan yang turun dan tidak tersedianya pekerjaan untuk perempuan, hal ini pun menjadi salah satu faktor yang turut mendorong kerawanan pangan, yang artinya *food sovereignty* atau kedaulatan pangan merupakan hal yang mustahil dicapai jika sistem dan praktek seperti ini masih dipertahankan.

Dari sekelumit catatan problem pangan dengan mengambil contoh kasus terancamnya pangan dalam bentuk kelangkaan pangan selama COVID-19, karena degradasi lahan, alih fungsi lahan hingga persoalan bagaimana hal tersebut mendorong *gender gap* yang mengarah pada *gender inequality* atau ketimpangan gender yang juga turut menjadi ancaman dalam *food sovereignty*. Maka catatan dalam tulisan ini akan menawarkan pandangan alternatif melalui kerangka pertanian yang berprinsip ekologis dan berkeadilan gender melalui kerangka ekofeminisme, terutama untuk menyusun kerangka konsep keamanan pangan berwawasan ekologis dan berperspektif keadilan gender guna menyokong *food sovereignty*.

Metode

Pada paper ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *secondary analysis of qualitative data* dengan menekankan pada studi kepustakaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pada penggunaan data sekunder dari jurnal atau penelitian sebelumnya untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena. *Secondary analysis* pada dasarnya dilakukan dengan membuat catatan konseptual atas teori atau peristiwa yang sebelumnya sudah diteliti, sebagai bagian dari pengembangan penelitian ke depannya. Pada prinsipnya, *secondary analysis* dapat digunakan untuk dua tujuan utama yakni menyelidiki pertanyaan penelitian baru atau tambahan sebagai sebuah alternatif, bisa jadi digunakan untuk memverifikasi temuan penelitian sebelumnya.²¹ Paper ini dalam pengumpulan data akan mengakses dari sumber internet seperti data penelitian ilmiah, data tekstual atau visual terkini dan data historis yang kredibel.²² Paper ini secara analisis memakai pendekatan berbagi data formal. Di sini peneliti mengakses kumpulan data yang

¹⁸ Ngadi Ngadi and others, 'Gender Inequality in the Indonesian Labor Market', *Women Empowerment and Well-Being for Inclusive Economic Growth* (IGI Global 2021).

¹⁹ Michael Levien, 'Gender and Land Dispossession: A Comparative Analysis' (2017) 44 *The Journal of Peasant Studies* 1111.

²⁰ Bina Agarwal, 'Food Security, Productivity, and Gender Inequality' [2014] *Handbook of food, politics and society*.

²¹ Tracy Long-Sutehall, Magi Sque and Julia Addington-Hall, 'Secondary Analysis of Qualitative Data: A Valuable Method for Exploring Sensitive Issues with an Elusive Population?' (2011) 16 *Journal of Research in Nursing* 335.

²² Sheryl L Chatfield, 'Recommendations for Secondary Analysis of Qualitative Data' (2020) 25 *The Qualitative Report* 833.

disimpan di publik atau institusi arsip nasional dan menggunakannya kembali dalam penelitian sekunder. Setelah itu data akan digunakan kembali sebagai catatan untuk menjawab pertanyaan penelitian, lalu dirangkai menjadi sebuah deskripsi yang komprehensif.²³

Hasil dan Diskusi

Kondisi hancurnya pertanian seperti adanya degradasi tanah, alih fungsi lahan sampai meningkatnya kerawanan pangan dari level nasional hingga perdesaan, terutama level rumah tangga. Jika situasi tersebut dapat ditarik pada aspek historis, maka akarnya pada praktik pertanian konvensional yang erat dengan industri besar pertanian, secara sistem sangat erat dipengaruhi oleh prinsip kapitalisme, melihat dari pola hubungan yang berorientasi pada pasar, baik dalam input pertanian sampai pada pasca produksi. Semakin menunjukkan sebuah relasi logis, di mana konteks modernisasi yakni pemutakhiran pertanian yang digawangi oleh kapitalisme global, dalam hal ini lembaga keuangan besar seperti World Bank sampai pada korporasi besar seperti Monsanto, Dupont, Bayer dll, benar-benar menciptakan perubahan pola pertanian dunia tak terkecuali negara dunia ketiga yang menjadi sasaran perubahan ini. Lebih jauh pada konteks revolusi hijau sebagai tonggak utama perubahan ini. Secara ide revolusi hijau dihadirkan untuk mengentaskan kemiskinan dan memenuhi pangan atau kata lain ketahanan pangan pada negara selatan yakni Asia dan Afrika.²⁴ Revolusi hijau di Indonesia digawangi oleh rezim Suharto yang menerima konsep ini sebagai imbalannya mendapatkan bantuan dari World Bank pada 1970. Secara agresif konsep revolusi hijau telah mengubah aspek sosial, ekonomi dan ekologis dari masyarakat. Revolusi hijau ini dijalankan dari atas ke bawah atau otoritatif, salah satu yang tampak adalah perubahan mendasar dari kelompok tani mandiri menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) yang diawasi oleh negara, dari bibit, cara tanam, penentuan tanam dan pasca produksinya. Kondisi tersebut mengubah pengetahuan lokal petani dalam menjalankan pertaniannya yang awalnya lekat dengan alam dan bersifat subsisten, dengan pengetahuan baru yakni pertanian monokultur, komersil dan berorientasi pasar.²⁵

Revolusi hijau yang tak lain adalah program intensifikasi pertanian untuk pangan yang betumpu pada tanaman padi untuk menghasilkan beras, pada awalnya mencapai produksi yang maksimal dan memuaskan. Tetapi saat swasembada tercapai, peningkatan produksi tetap dibutuhkan dan semakin dimasifkan, tidak hanya untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, juga untuk memenuhi permintaan beras yang terus meningkat dari penduduk yang semakin meningkat taraf kesejahteraannya. Strategi produksi maksimum diberlakukan dengan memberi tekanan pada area penanaman yang paling menguntungkan dengan memberikan akses tinggi ke input pertanian. Dimulai pada tahun 1987, program pemerintah Indonesia (Supra Insus) adalah sebuah rencana yang sangat ketat dan diarahkan untuk tujuan ini. Daerah unggulan untuk dijadikan sasaran program ini adalah empat provinsi di Jawa dan sejumlah provinsi penting penghasil beras lainnya, yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Nusa

²³ Janet Heaton, 'Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview' [2008] *Historical Social Research/Historische Sozialforschung* 33.

²⁴ A Haroon Akram-Lodhi, '(Re) Imagining Agrarian Relations? The World Development Report 2008: Agriculture for Development' (2008) 39 *Development and Change* 1145.

²⁵ Yunita T Winarto, "Memanusiakan Manusia'Dalam Lingkungan Yang Tangguh: Mengapa "Jauh Panggang Dari Api"?" [2014] *Antropologi Indonesia*.

Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Dengan demikian, ada kurang lebih 11 dari 27 provinsi merupakan andalan produksi beras Indonesia.²⁶

Pulau Jawa secara konsisten menyumbang sekitar 63 persen dari total produksi sejak awal program intensifikasi beras Indonesia jika merujuk pada catatan peneliti Fox (1992) dalam Fox (1993). Strategi dari peningkatan produksi beras di Jawa ini bukanlah pembukaan lahan pertanian baru, tetapi pemanfaatan lahan yang ada secara lebih efektif dengan meningkatkan intensitas tanam yang lebih tinggi dan peningkatan hasil dari sawah beririgasi yang sudah ada. Di tempat lain di negara ini, produksi tidak terlalu bergantung pada peningkatan intensitas dan hasil panen, tapi lebih kepada pembukaan area penanaman baru. Menurut pengamatan Fox (1991) dalam Fox (1993) hasil panen rata-rata di Jawa pada akhirnya meningkat dari 2,58 ton per hektar pada tahun 1968 menjadi 4,98 ton per hektar pada tahun 1989, sedangkan hasil panen di tempat lain hanya meningkat dari 2,15 ton per hektar pada tahun 1968 menjadi 3,52 ton per hektar pada tahun 1989. Selama periode program intensifikasi, Indonesia mengalami kesenjangan yang semakin lebar antara Jawa dan daerah lain di Indonesia. Sampai pada akhirnya program ini berhenti, tetapi pola-pola seperti ini akhirnya melekat dan kebiasaan baru. Selain itu, revolusi hijau juga mendorong konversi padi asli dengan varietas hibrida yang cepat dalam produksinya, hal tersebut mendorong adanya peningkatan irigasi, pemakaian pupuk kimia, herbisida dan pestisida, serta mekanisasi pertanian. Hasil panen memang meningkat pesat dan swasembada beras dapat dicapai dalam waktu yang relatif cepat pada 1984. Tapi, revolusi hijau memiliki implikasi ekologis dengan rusaknya ekosistem, salah satunya adanya degradasi tanah, penurunan kesuburan tanah, berkurangnya unsur hara, erosi dan pencemaran air.²⁷

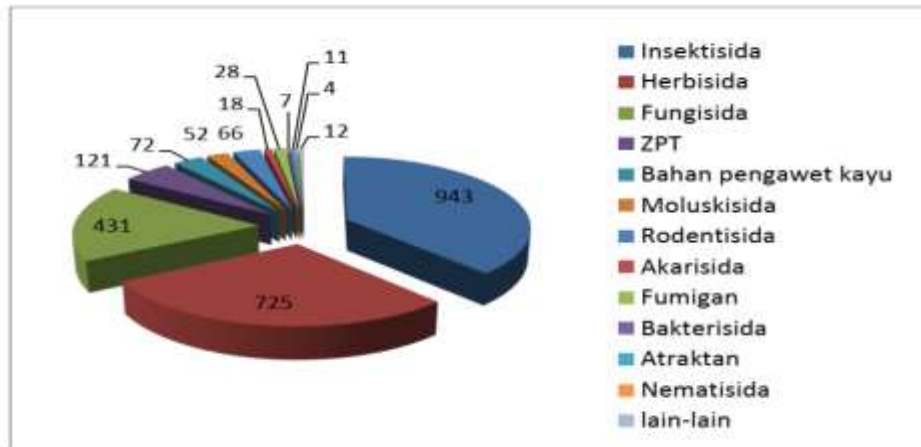
Berdasarkan catatan dari Irsal (2009) dari Litbang Pertanian, sejak periode 1969-1980 terdapat peningkatan produksi beras sekitar 5,6 persen, lalu pada 1980-1984 meningkat dengan persentase 7,1 persen. Tetapi secara berangsur mengalami penurunan pada 1984-1992 dengan 3,3 persen per tahun. Periode 1992-2006 laju produksi pada hanya sekitar 1,3 persen per tahun.²⁸ Meskipun demikian, kementerian mengklaim telah meningkatkan kembali sampai pada tahun 2007-2008 dengan melakukan intensifikasi pertanian, melalui bibit hibrida dan pemupukan. Dalam catatan singkat Prihasto (2015) memperlihatkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Kementerian Pertanian, berdasarkan formulasi pestisida yang terdaftar sampai bulan Oktober 2012 ada sebanyak 2.987 formulasi. Penggunaan pestisida tengah meningkat dari tahun ke tahun meskipun sudah ada Sekolah Lapangan Penanggulangan Hama Terpadu sudah dirintis dari tahun 1985 sampai dengan 1998/1999.²⁹ Hal ini paling tidak menunjukkan suatu kemungkingna adanya pencemaran tinggi akibat pola-pola pemakaian pestisida yang tinggi, selebihnya dapat dilihat pada gambar di bawah:

²⁶ James J Fox, 'Ecological Policies for Sustaining High Production in Rice: Observations on Rice Intensification in Indonesia' [1993] South-East Asia's Environmental Future: The Search for Sustainability 211.

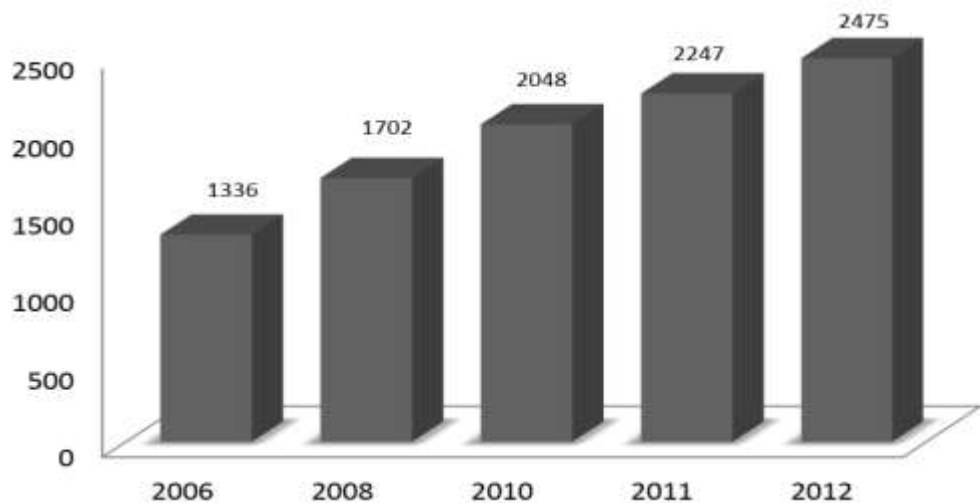
²⁷ ibid.

²⁸ Irsal Las, 'Revolusi Hijau Lestari Untuk Ketahanan Pangan Ke Depan' (2009) 14 Tabloid Sinar Tani.

²⁹ Prihasto Setyanto, 'Indonesian Environmental Challenges toward Sustainable Agriculture' 5.



Gambar 1: angka pestisida yang terdaftar di Kementrian Pertanian tahun 2012 (Prihasto, 2015)

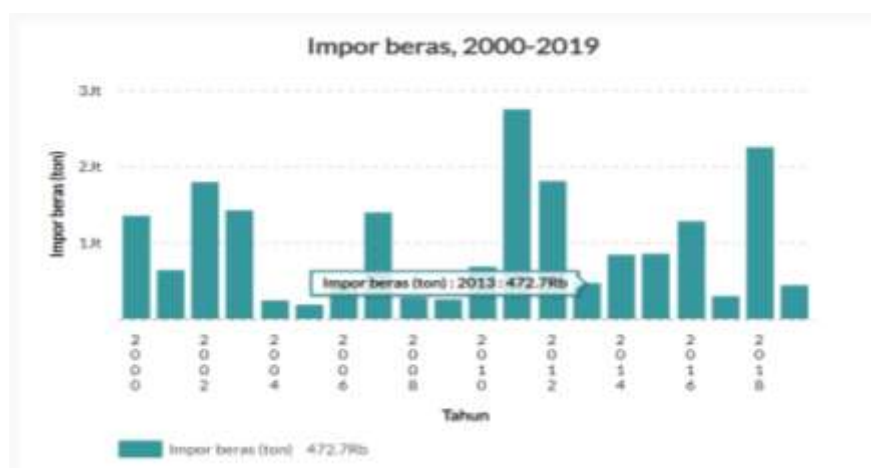


Gambar 2: angka peningkatan formulasi pestisida dari tahun 2006-2012 (Prihasto, 2015)

Sebagai dampak jangka panjang, ada penurunan luas panen padi di Indonesia, hal ini terekam pada data tahun 2019 dengan perkiraan penurunan luas panen padi sebesar penurunan sebesar 700,05 ribu hektar atau 6,15 persen jika dibandingkan dengan data pada tahun 2018. Selain itu produksi padi pada 2019 mengalami penurunan sekitar 4,60 juta ton gabah kering atau 7,76 persen, dampaknya berimbas pada penurunan beras sebanyak 2,63 juta ton atau 7,75 persen.³⁰ Kondisi tersebut kemudian memicu jumlah impor beras Impor sebesar 444,5 ribu ton. Meski begitu jumlah tersebut termasuk lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang kurang lebih impornya sekitar 80,3 persen, perlu diketahui impor tertinggi terjadi pada 2011 dengan jumlah mencapai 2,8 juta ton.³¹ Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor tingginya konsumsi beras serta penurunan produksi beras.

³⁰ BPS Indonesia, 'Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2019'.

³¹ Lokadata.id, 'Impor Beras, 2000-2019' (21 Oktober, 2020) <<https://lokadata.id/data/impor-beras-2000-2019-1603273725>>.



Gambar 3: impor beras 10 tahun terakhir (Lokadata, oktober 2018)

Ketimpangan Gender dalam Pertanian

Seperti hasil penelitian dari Purwandaru dkk (2016) mengungkapkan bahwa pola pertanian di Jawa terutama pada lahan sawah yang menghasilkan padi awalnya dilakukan secara tradisional. Salah satunya adalah bagaimana perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam tradisi tersebut. Saat tahap penanaman perempuan memiliki tugas untuk memindahkan padi muda dari awalnya benih yang sudah siap tanam ke sawah. Lalu ada peran untuk melakukan perawatan seperti pengusiran hama dan menyiangi rumput atau menarik rumput. Saat pemanenan perempuan juga memiliki peran seperti mengangkut hasil panen, mengolah hasil panen seperti memprosesnya dengan mengeringkannya, sampai proses mengolah pada menjadi beras, perempuan memiliki peran signifikan yakni melakukan penyortiran untuk memilah kualitas dari beras. Pasca Revolusi hijau diterapkan, keterlibatan perempuan mulai berkurang berangsur-angsur, selain diambil alih oleh laki-laki juga diakibatkan mekanisasi pertanian, sehingga tugas yang biasanya mereka lakukan digantikan oleh mesin. Selain itu juga menunjukkan perubahan hubungan dari konsep tradisional yang memiliki hubungan dengan tanah yang ditandai setiap pasca panen tanah diistirahatkan, berubah menjadi lahan produksi tanpa henti yang tidak pernah diistirahatkan, karena orientasinya adalah maksimalisasi hasil.³²

Selain mengakibatkan kerentanan pangan yang didorong oleh hancurnya agroekosistem, revolusi hijau juga mendorong *gender gap* yang lekat dengan persoalan ketimpangan gender. Pada dasarnya yang terjadi merupakan perubahan perubahan sosioteknik dalam penanaman dan pemanenan. Tersisihya tenaga kerja perempuan menunjukkan pergeseran dari tenaga kerja manual ke mesin yang dioperasikan secara dominan oleh laki-laki. Hal ini pun berimplikasi pada pergeseran pekerjaan perempuan dari pekerjaan pertanian dan menunjukkan transformasi pekerjaan panen berbasis kearifan lokal ke bisnis komersial. Paling tidak perubahan dalam hubungan sosial berbasis produksi pada kekerabatan dan patron-klien harus didasarkan pada hubungan majikan-pekerja, ketika terjadi transformasi oleh mekanisasi Revolusi hijau. Selain itu, dampak dari

³² Pandu Purwandaru, Dudy Wiyancoko and Akira Ueda, 'The Rice Postharvest Utilization Scheme Between Traditional and Post Green Revolution Era in Javanese Community' (2016) 4 Bulletin of JSSD Vol. 63 No 79.

mekanisasi pertanian tersebut yakni adanya eksklusi pada perempuan dalam kegiatan panen dan juga pengurangan tenaga kerja laki-laki dengan penggunaan mesin.³³

Sejalan dengan catatan di atas penelitian dari Partasasmita dkk (2019) menyebutkan pada awal kelola pertanian tradisional baik petani laki-laki maupun perempuan secara intensif terlibat dalam berbagai kegiatan usaha tani padi sawah berbasis pembagian peran yang setara. Contohnya, petani perempuan terlibat bekerja dalam berbagai kegiatan yang tidak membutuhkan tenaga tetapi menuntut kecermatan dan kerajinan, salah satunya adalah pemilihan bibit padi. Sebaliknya, beberapa pekerjaan, termasuk mencangkul dan membajak, dilakukan oleh petani laki-laki. Pada akhir 1960-an, pemerintah Indonesia memodernisasi pertanian lahan basah melalui program Revolusi hijau. Akibatnya, sebagian besar petani perdesaan di Jawa Barat mengadopsi program ini. Lanjutnya, sebelum modernisasi penanaman padi sawah di wilayah Karangwangi dilakukan secara tradisional berdasarkan kearifan lokal. Berbagai kegiatan dari setiap tahapan usaha tani padi sawah dilakukan oleh petani laki-laki dan perempuan melalui pembagian tugas berdasarkan keahlian. Tidak hanya itu saja selama musim tanam baik pra maupun pasca tanam petani melakukan ritual sebagai bentuk penghormatan pada Dewi Sri sebagai simbol keberlimpahan, selain itu perempuan dalam ritual menjadi pemeran utama. Meski saat diterapkannya revolusi hijau para petani perempuan masih terlibat dalam berbagai kegiatan pertanian padi. Tapi, terdapat beberapa aktivitas perempuan yang hilang, salah satunya pengamatan bintang di langit untuk menentukan masa tanam, pemilihan benih padi, dan penimbunan butir padi pasca panen, karena pertanian yang diperkenalkan oleh Revolusi hijau menekankan pada mekanisasi pertanian, seperti penggunaan teknologi mutakhir dan pola tanamnya yang hanya satu jenis komoditas.³⁴

Paling tidak realitas yang dijabarkan di atas memberi sebuah gambaran utuh tentang pola-pola perubahan pertanian, kerentanan pangan, dampak lingkungan dan proses ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia yang dimulai sejak revolusi hijau. Tentu, semakin menguatkan asumsi bahwa sebagai dampak dari revolusi hijau yang dijual kepada pemerintah dan petani dengan dalih akan meningkatkan produktivitas yang otomatis mengontrol pendapatan dan menciptakan efisiensi. Tetapi faktanya sekarang negara dan petani secara tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem kapitalisme internasional yang berdasarkan ketergantungan, deregulasi dan manipulasi pasar komoditas, subsidi yang tidak adil, munculnya ketidaksetaraan seperti ketimpangan gender dan ancaman terhadap keamanan pangan. Secara historis peta perubahan pertanian konvensional yang mengakibatkan kerusakan ekosistem, dimulai dengan revolusi hijau sebagai tonggak komersialisasi dan kapitalisasi pertanian di Indonesia. Hal inilah yang secara tidak langsung mendorong betapa rawannya pangan di Indonesia, terlebih masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras, lalu terjebak pada pertanian komersil yang sifatnya monokultur sehingga kondisi ini sangat mempengaruhi keberlanjutan pangan ke depan.³⁵

Ekofeminisme dan *Food Sovereignty*

³³ Awaluddin Yunus and others, 'Sociotechnical Change and Institutional Adjustment in Paddy Rice Farming during Post Green Revolution in Indonesia' (2016) 4 International Journal of Agriculture System 218.

³⁴ RUHYAT PARTASASMITA and others, 'Impact of the Green Revolution on the Gender's Role in Wet Rice Farming: A Case Study in Karangwangi Village, Cianjur District, West Java, Indonesia' (2019) 20 Biodiversitas Journal of Biological Diversity 23.

³⁵ Thomas Reuter and Graeme MacRae, 'Regaining Lost Ground: A Social Movement for Sustainable Food Systems in Java, Indonesia' [2019] Anthropology of food.

Gagalnya revolusi hijau telah mendorong tumbuhnya kesadaran tentang masalah lingkungan. Cooper dkk (1992) dalam catatan Smale (1997) menyampaikan jika revolusi hijau tidak sekedar menghancurkan keragaman, tetapi juga memunculkan benih baru untuk menggantikan varietas tradisional lama dan kerabat liarnya akibatnya benih-benih lokal mulai punah. Ini menunjukkan jika sistem pertanian yang diciptakan oleh revolusi hijau sangat bergantung pada beberapa varietas untuk tanaman utamanya. Varietas benih unggul memiliki basis genetik yang sempit, dan para petani menabur semua ladang mereka hanya dengan satu jenis benih. Hal ini mengakibatkan perpindahan ribuan spesies asli lokal serta sistem pertanian yang telah dibangun dari generasi ke generasi atas dasar pengetahuan terakumulasi selama berabad-abad. Tanaman yang paling sukses dan tersebar luas adalah beras, jagung dan gandum, yang membutuhkan daerah yang memiliki curah hujan tinggi atau irigasi yang cukup. Revolusi hijau telah menjadi proses yang paradoks.³⁶

Menurut Vandana Shiva jika paradoks revolusi hijau di satu sisi menawarkan teknologi sebagai pengganti alam dan politik dalam penciptaan kelimpahan dan kedamaian. Di sisi lain, teknologi itu sendiri menuntut lebih intensif penggunaan sumber daya alam bersama dengan input eksternal yang intensif. Sehingga menciptakan ketergantungan dan hilangnya kemandirian atas pangan, kondisi ini juga mendorong hilangnya diversifikasi pangan. Nilai-nilai budaya dan spiritual terkait dengan keanekaragaman hayati serta pengetahuan tradisional. Secara tradisional, varietas dan pengetahuan pertanian dibagikan di antara perempuan, petani, dan masyarakat adat secara turun-temurun melalui pameran desa, festival panen, dan upacara keagamaan yang memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan varietas. Namun, modernisasi dan komersialisasi pertanian mengadopsi pendekatan *top-down* di mana petani diberitahu spesies apa yang baik untuk budidaya. Pertanian tradisional diabaikan. Benih varietas unggul baru dibangun di atas pergeseran keragaman genetik dan tidak beradaptasi dengan baik dengan mikrobiologi tanah lokal.

Shiva berpendapat bahwa, terutama di masa perubahan iklim, homogenisasi produksi tanaman berbahaya. Tidak seperti galur benih asli, yang dikembangkan dalam jangka waktu yang lama dan oleh karena itu disesuaikan dengan kondisi area tertentu, galur benih yang dipromosikan oleh perusahaan besar memerlukan aplikasi pupuk dan pestisida dalam jumlah besar. Jika dikaitkan dengan revolusi hijau, maka dampak yang perlu dilihat dari paket intensifikasi pertanian ala Revolusi hijau telah menguras kesuburan alam, meningkatkan kerusakan hama, mengeringkan akuifer (tampungan air) dan mengurangi *agrobiodiversity* (keanekaragaman hayati pada lahan). Dengan demikian, revolusi hijau meningkatkan resiko lingkungan dan menjadi faktor pendorong yang memperburuk kerentanan ekonomi pada petani miskin. Revolusi hijau juga telah menyebabkan “erosi genetik” serius, hilangnya varietas tradisional dari agroekosistem, seperti adanya pengurangan drastis jumlah varietas tanaman lokal. Hal tersebut merupakan produk sampingan dari efek samping yang dihasilkan oleh revolusi hijau yang. Sebagai perbandingan, pertanian yang telah diusahakan sejak lama bahkan lebih dari 100 tahun yang lalu, berdasarkan ras tradisional multi-genotipe heterozigot dan budidaya input rendah, berlaku ribuan tahun dan masih ada sekarang di pertanian subsisten pada daerah marginal meskipun produktivitasnya rendah.³⁷ Revolusi hijau dan sisa-sisanya sekarang, merupakan bagian dari proyek pasca kolonial yang dapat dibaca sebagai *developmentalism*. Menurut Shiva *developmentalism* bergerak dan menubuh dalam ekonomi pasar, prinsip pengorganisasian

³⁶ Melinda Smale, 'The Green Revolution and Wheat Genetic Diversity: Some Unfounded Assumptions' (1997) 25 *World development* 1257.

³⁷ Vandana Shiva, *The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics* (Zed Books 1991).

pemanfaatan sumber daya alam adalah memaksimalkan keuntungan dan akumulasi modal. Alam dan kebutuhan manusia dikelola melalui mekanisme pasar. Paradoks dan krisis pembangunan muncul dari kesalahan identifikasi kemiskinan yang dirasakan secara kultural dengan kemiskinan material yang nyata, dan identifikasi yang keliru dari pertumbuhan produksi komoditas sebagai pemuasan kebutuhan dasar yang lebih baik.³⁸

Kondisi yang dihasilkan melalui pembangunan yang keliru atau bentuk dari *missed-management* atas alam paling langsung dampaknya dirasakan oleh perempuan, sebab mereka di manapun tempatnya, seringkali menjadi orang pertama yang memperhatikan degradasi lingkungan. Karena perempuan adalah yang pertama kali memperhatikan ketika air yang mereka gunakan untuk memasak dan memandikan anak-anak berbau aneh, merekalah yang pertama tahu kapan persediaan air mulai mengering. Hilangnya keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional sangat merugikan, tetapi tidak hanya bagi perempuan tetapi juga untuk ketahanan pangan, keamanan gizi dan juga membahayakan kesehatan masyarakat. Hal itu juga akan menghancurkan keluarga. Lambat laun pada akhirnya mengancam masa depan pertanian tradisional berbasis keragaman. Perempuan bertanggung jawab atas ketahanan pangan dan gizi keluarga dan diri mereka sendiri. Namun, ketahanan pangan lokal didasarkan pada ketersediaan keanekaragaman hayati dan akses terhadapnya. Karena itu, ekofeminisme tumbuh dari gagasan bahwa etika perempuan lebih dekat dengan alam daripada laki-laki dan menilai kembali sifat-sifat feminin. Perempuan terlihat sinkron dengan alam, bekerja dalam kesatuan dengannya, sedangkan laki-laki memiliki hubungan hierarkis dengan alam di mana tindakan mereka mencoba mendominasinya. Munculnya gerakan perempuan dan lingkungan secara simultan menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara feminisme dan ekologi.³⁹

Ekologi dan feminisme memiliki kerangka yang saling terkait, karena itu memiliki tujuan kebijakan yang serupa. Prinsip utama ekofeminisme adalah bahwa masalah sosial dan lingkungan memiliki keterkaitan, bahwa penyebab penindasan terhadap perempuan, orang kulit berwarna dan lingkungan berasal dari tempat yang sama. Karena itu, dari perspektif ekofeminis yang terbaik adalah melihat semua masalah ini secara kolektif dan koheren. Lebih jauh lagi, para antropolog saat ini umumnya setuju bahwa domestikasi tanaman dikembangkan oleh perempuan. Peradaban kuno tempat umat manusia dibangun tidak didirikan oleh perang dan penindasan, menjadi sebuah bukti menunjukkan bahwa perempuan dan alam sangat dihargai di banyak budaya. Banyak peradaban kuno yang damai, dan baik laki-laki maupun perempuan hidup dalam harmoni satu sama lain dan alam.⁴⁰ Sehingga persoalan kerusakan lahan, kerawanan pangan sangat memiliki interseksi dengan problem ketimpangan gender di pertanian.

Lalu apa keterkaitan ekofeminisme dengan *food sovereignty*, pada dasarnya *food sovereignty* menegaskan hak masyarakat untuk menentukan dan mengatur sistem pertanian dan pangan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan lokal dan untuk mengamankan akses ke tanah, air dan benih. Komitmen terhadap kesetaraan gender telah tertanam dalam konsep kedaulatan pangan sejak artikulasinya yang paling awal. Jika perempuan merupakan mayoritas produsen pangan dunia, maka kebijakan pertanian adalah isu perempuan. Dan sejauh hubungan sosial patriarki terus mendominasi dunia, maka perubahan kebijakan pertanian akan membutuhkan perhatian eksplisit terhadap ketidakadilan gender. Dari argumentasi ini dapat ditangkap bahwa kebijakan pertanian dan pangan yang berangkat dari revolusi hijau telah mendorong *gender gap* dan hilangnya peran perempuan sebagai

³⁸ Vandana Shiva, *Development, Ecology, and Women* (Routledge 2018).

³⁹ Vandana Shiva and Maria Mies, *Ecofeminism* (Zed Books Ltd 2014).

⁴⁰ Ariel Salleh, 'Ecofeminism', *Routledge Handbook of Ecological Economics* (Routledge 2017).

produsen, disamping dampak-dampak lain yang menjurus pada rawannya pangan dan menunjukan perempuan lebih luas lagi komunitas termasuk laki-laki pada akhirnya kehilangan kedaulatan atas pangannya.⁴¹

Merujuk pada argumetasi Patel (2012) perlu menjadi catatan bahwa tujuan utama dari kedaulatan pangan adalah terkait tidak adanya dominasi dalam menentukan produksi hingga pasca produksi terkait pangan, terutama keputusan tentang bentuk sistem pangan seharusnya tidak berada di tangan perusahaan yang kuat atau pemerintah yang dominan secara geopolitik, tetapi kembali kepada orang-orang yang bergantung pada sistem pangan. Perlu dilihat bahwa salah satu elemen dari kedaulatan pangan yang tidak dapat ditawarkan lagi adalah hak perempuan. Artikulasi dalam argumen hak perempuan adalah agar percapakan demokratis tentang kebijakan pangan dan pertanian terjadi, perempuan harus dapat berpartisipasi dalam diskusi sebebaskan laki-laki. Di sisi produksi sistem pangan, perempuan merupakan 43% dari tenaga kerja pertanian yang lebih sering terlibat dalam memproduksi makanan untuk konsumsi domestik daripada ekspor. Mereka didiskriminasi dalam berbagai isu mulai dari kepemilikan lahan hingga upah, dari dukungan pemerintah hingga akses ke teknologi. Menurut catatan dari FAO dalam catatan Patel (2012) mengemukakan jika perempuan yang memiliki akses sama ke sumber daya produktif seperti laki-laki, mereka dapat meningkatkan hasil pertanian mereka sebesar 20-30 persen. Hal ini dapat meningkatkan total hasil pertanian di negara-negara berkembang sebesar 2,5-4 persen, pada gilirannya dapat mengurangi jumlah orang yang kelaparan di dunia sebesar 12-17 persen.⁴²

Itulah mengapa, ekofeminisme juga menjadi sebuah gerakan aktivis dan akademis yang tujuan utamanya adalah untuk mengatasi dan menghilangkan semua bentuk dominasi, kemudian mengakui dan merangkul saling ketergantungan dan hubungan yang dimiliki manusia dengan bumi. Banyak kritik lingkungan telah menunjukkan bagaimana kontrol dan eksploitasi alam terkait dengan kontrol dan eksploitasi manusia terutama perempuan. Sebab, isu-isu yang merusak secara ekologis memiliki efek yang lebih merugikan pada perempuan daripada laki-laki, terutama karena perempuan cenderung lebih terlibat dalam penyediaan keluarga dan pengelolaan rumah tangga. Masalah-masalah tersebut termasuk pembangunan pangan berkelanjutan, penggundulan hutan, pengurangan, akses ke air bersih, banjir, perubahan iklim, akses ke tanah subur, polusi, pembuangan limbah beracun, masalah pengelolaan lahan, sumber daya energi yang tidak terbarukan, praktik penambangan dan penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab, hilangnya keanekaragaman hayati (bahan bakar, obat-obatan, makanan). Lalu, saat krisis ekonomi, perempuanlah yang menanggung beban dan merekalah yang pertama pergi tanpa bekal seperti makanan, obat-obatan dan pendidikan.⁴³

Shiva melalui gagasannya mungkin paling dikenal sebagai kritikus revolusi hijau serta pola-pola penguasaan pangan oleh segelintir orang yang memaksakan kehadaknya pada banyak orang, terutama dalam bingkai sebuah upaya internasional yang dimulai pada 1960-an untuk meningkatkan produksi pangan di negara-negara kurang berkembang melalui stok benih hasil lebih tinggi, dan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk. Revolusi hijau telah menjadi tonggak yang menyebabkan polusi, hilangnya keanekaragaman benih asli, pengetahuan pertanian tradisional, dan ketergantungan yang

⁴¹ Anne Portman, 'Food Sovereignty and Gender Justice' (2018) 31 *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 455.

⁴² Rajeev C Patel, 'Food Sovereignty: Power, Gender, and the Right to Food' (2012) 9 *PLoS medicine* e1001223.

⁴³ Dipanwita Pal, 'Ecofeminism: A Study at the Roots of Gender Inequalities', *Scientia Moralitas Conference Proceedings* (Research Association for Interdisciplinary Studies 2021).

mengganggu dari petani miskin pada bahan kimia yang mahal. Kini pasca revolusi hijau banyak tanah yang mulai kurang subur, petani bergantung pada benih genetik, pangan berangsur mulai menurun kuantitas dan kualitasnya, ditambah pula dengan degradasi lingkungan karena eksploitasi besar-besaran dengan dampak yang paling terlihat adalah perubahan iklim.⁴⁴ *Food Sovereignty* hanya mimpi atau utopia jika persoalan ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem pangan konvensional yang menindas tidak segera di atasi dalam sebuah transformasi sosial.

***Food Sovereignty* Berbasis Agroekologi dan Commons**

Agroekologi adalah cara mempraktikkan pertanian atau menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Ini mengusulkan keputusan dengan model pembangunan perdesaan hegemonik berdasarkan perkebunan besar dan perkebunan tanaman tunggal yang menguntungkan sebagian besar bisnis pertanian dan mengukuhkan eksklusi sosial.⁴⁵ Dalam pertanian keluarga, agroekologi bermanifestasi sebagai resistensi terhadap model pembangunan saat ini dan masalah sosial, budaya, lingkungan, dan ekonominya. Ini menentang kurangnya otonomi modal keuangan petani; dan melambungkan perlawanan terhadap model agribisnis saat ini.⁴⁶ Sebagai sebuah konsep agroekologi mendorong pertanian regeneratif berbasis nilai ekologis, selain itu juga mendorong tata kelola berbasis komunitas yang tujuannya adalah rumah tangga petani dengan mengedepankan prinsip keadilan gender. Perempuan memiliki peran dan porsi yang sama dengan laki-laki dalam melakukan pengelolaan pertanian ini, sejalan dengan konsepsi ekofeminisme yang menekankan rekonsepsi atas pengelolaan atas sumber-sumber pangan dan alam.⁴⁷ Merujuk pada Shiva secara artikulatif bahwa degradasi lahan, keanekaragaman hayati, erosi, kesehatan masyarakat, situasi perempuan, perubahan iklim, tidak terpisah. Mereka satu kesatuan yang didorong oleh sistem pangan yang eksploitatif dengan paradigma monokultur dan berorientasi pada akumulasi kapital.⁴⁸

Mulai sadarnya komunitas petani terkait dampak pola pertanian konvensional yang tidak berkelanjutan dan berkeadilan, mendorong mereka beralih pada konsep pertanian organik yang merupakan salah satu praktik dari konsep agroekologi. Seperti munculnya praktik pertanian organik bukan tanpa sebab, tetapi mendorong proses perubahan yang mendasar yakni konsep pertanian yang menekankan pada rehabilitasi alam (Reuter, 2019). Sebagai contoh di Thailand, akibat dari degradasi lahan tersebut, pertanian organik muncul pada tahun 2008. Adopsi awal pertanian organik di Thailand berkaitan dengan aksesibilitas air, kemampuan untuk mencari harga di tingkat petani yang lebih tinggi, dan sikap terhadap masalah konvensional. Singkatnya, tidak ada faktor pengendalian oleh petani. Namun, beberapa faktor seperti pekerjaan di luar pertanian, perbedaan harga, aksesibilitas air, kredit. Dukungan dan sikap terhadap pertanian organik dapat dikendalikan oleh kebijakan. Keputusan mengadopsi pertanian organik menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi semua petani organik adalah

⁴⁴ László Erdős, 'Vandana Shiva-Defending Traditional Agriculture', *Green Heroes* (Springer 2019).

⁴⁵ William D Schanbacher, *The Politics of Food: The Global Conflict between Food Security and Food Sovereignty* (ABC-CLIO 2010).

⁴⁶ Peter Rosset, 'Re-Thinking Agrarian Reform, Land and Territory in La Via Campesina' (2013) 40 *Journal of Peasant Studies* 721.

⁴⁷ Luis Fernando Gómez, Leonardo Alberto Ríos-Osorio and María Luisa Eschenhagen-Durán, 'Key Concepts of Agroecology Science. a Systematic Review' (2016) 19 *Tropical and Subtropical Agroecosystems* 109.

⁴⁸ Vandana Shiva, 'Earth Democracy: Sustainability, Justice, and Peace' (2018) 26 *Buff. Envtl. LJ* 1.

permintaan makanan sehat, dan masalah kesehatan manusia dan hewan dampak dari pertanian konvensional.⁴⁹

Di Indonesia, tonggak awal pertanian organik dimulai pada awal 1980-an, khususnya di Jawa. Praktik ini dimulai dari sebuah inisiatif dari Bina Sarana Bhakti foundation (BSB) di Jawa Barat yang bekerja sama dengan petani kecil, untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan. Pertanian organik dipandang sebagai alternatif dari revolusi hijau, yang mendegradasi lingkungan dan membutuhkan biaya produksi yang tinggi bagi petani.⁵⁰ Selain itu pertanian organik sebagai adopsi dari pertanian berkelanjutan juga digawangi oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Via Campesina, sebagai kritik atas pertanian konvensional yang dianggap merusak kesuburan tanah dan semakin memperlebar kesenjangan.⁵¹ Sementara pemerintah baru mengadakan program bertajuk Go Organic di tahun 2010. Program tiga tahap ini dimulai pada tahun 2001 yang dikategorikan sebagai langkah awal, terus di tahun 2005. Lalu berkembang dengan baik, saat infrastruktur sudah dibangun. Dilanjutkan pada tahun 2010 Indonesia, kementerian berambisi untuk menjadi salah satu dari produsen pertanian organik terbesar di dunia.⁵² Tetapi itu tidak cukup, sebab kerangkanya masih belum menekankan pada kebebasan komunitas, yakni masih melihat produksi pangan hanya sekedar jual beli komoditas bukan sebagai sesuatu yang esensial.

Pada beberapa studi tentang hubungan pertanian organik dengan *food security* (keamanan pangan) menyatakan memiliki keterkaitan. Pertanian organik dapat meningkatkan *food security*, hal ini dilihat dari penggunaan teknik pertanian organik mengoptimalkan produksi dan meningkatkan keamanan serta kesehatan pangan individu, sehingga dalam jangka panjang mempromosikan *food security*.⁵³ Selain itu pertanian organik juga memberikan jaminan *food security* pada rumah tangga petani dengan lahan kecil pada aspek kecukupan ekonomi dan keberlanjutan.⁵⁴ Hal ini sejalan dengan konteks pertanian berkelanjutan yang dapat dicapai dengan pemanfaatan dan implementasi teknik pertanian, dengan meningkatkan produksi tanaman untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan populasi, sementara pada saat yang sama akan melestarikan, dan melindungi ekosistem.⁵⁵ Jika *food security* berkelanjutan dapat dijalankan, maka bukan tidak mungkin *food sovereignty* dapat diwujudkan.

Secara konsep menyitir dari pendekatan Shiva pendekatan kelola pertanian organik dalam kerangka agroekologi harus menekankan pada prinsip *commons* atau milik bersama. *Commons* adalah sumber daya yang tidak dapat dimonopoli oleh segelintir orang.

⁴⁹ Katesuda Sitthisuntikul, Pradtana Yossuck and Budsara Limnirankul, 'How Does Organic Agriculture Contribute to Food Security of Small Land Holders?: A Case Study in the North of Thailand' (2018) 4 Cogent Food & Agriculture
<<http://doi.org/10.1080/23311932.2018.1429698>>.

⁵⁰ Siti Jahroh, 'ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN INDONESIA : LESSONS LEARNED FROM ORGANIC FARMING IN WEST' (ISDA 2010).

⁵¹ Nancy Lee Peluso, Suraya Afiff and Noer F Rachman, 'Membuat Alasan Dan Alas Yang Sama Demi Reformasi: Gerakan-Gerakan Agrarian Dan Lingkungan Di Indonesia' (2012) 28 Wacana 13.

⁵² Sri Rochayati, Irawan and Husnain, 'Current Status of Organic Farming in Indonesia' [2011] Indonesian Soil Research 1
<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/indonesia_organic_farming_2011_IndonesiaDOC.pdf>.

⁵³ Laleh Morshedi and others, 'The Role of Organic Farming for Improving Food Security from the Perspective of Fars Farmers' (2017) 9 Sustainability (Switzerland).

⁵⁴ Sitthisuntikul, Yossuck and Limnirankul (n 49).

⁵⁵ Naveen Kumar Arora, 'Agricultural Sustainability and Food Security' (2018) 1 Environmental Sustainability 217 <<https://doi.org/10.1007/s42398-018-00032-2>>.

Istilah itu sendiri menunjukkan keterikatan yang kuat dengan komunitas. Shiva menyatakan bahwa *commons* dan komunitas berada di luar kerangka negara dan pasar. Sumber daya komunitas kemudian berarti bahwa mereka tidak hanya digunakan secara kolektif oleh komunitas tertentu tetapi digunakan dengan cara yang menjamin kelangsungan hidup mereka untuk generasi mendatang. Keberlanjutan ini dijamin melalui serangkaian praktik dan pengetahuan, yang asli dari kelompok-kelompok lokal dan secara budaya signifikan untuk suatu wilayah dan komunitas tertentu. Sebab dominasi, kontrol dan eksploitasi yang tidak hanya mengarah pada penipisan sumber daya, tetapi juga menempatkan komunitas dan sistem pengetahuan tradisional terancam. Pendekatan ini lalu mengarah pada penekanan pada hak petani dan upaya memproteksi dan merehabilitasi keanekaragaman hayati.⁵⁶

Maka kelola pertanian organik yang menjadi salah satu solusi pangan berkelanjutan harus ditata berdasarkan kebutuhan komunitas dan benar-benar dijalankan atas dasar kebutuhan bukan lagi pasar ke depannya, karena pangan adalah energi pokok yang seharusnya menjadi *commons*. Sebab *Food Sovereignty* bertumpu pada keberlanjutan pangan komunitas dan sumber-sumber penghasilnya. Meski menerapkan pertanian organik, jika orientasi utamanya adalah pasar bukan subsistensi komunitas, maka kerentanan pangan akan tetap ada, karena kita berbicara ketersediaan pangan komunitas yang berkelanjutan, bukan ketersediaan pangan oleh pasar yang rentan dan rawan dipermainkan oleh spekulasi. Berkaca pada situasi COVID-19 dan mungkin wabah-wabah ke depannya situasi pangan akan semakin rentan, jika sistem pangan dan ekonomi yang sangat eksploitatif saat ini masih dipertahankan.

Kesimpulan

Situasi COVID-19 telah mengajarkan bagaimana rawannya pangan kita, terutama ketersediannya yang semakin rentan, ini juga ditandai dengan maraknya impor pangan oleh pemerintah Indonesia hingga mengubah kawasan non-pangan seperti hutan menjadi kawasan pangan, sehingga menyebabkan deforestasi dan terganggunya ekosistem. Selain itu juga rusaknya kawasan hutan juga berdampak pada masyarakat adat terutama hilangnya sumber pangan mereka. Alih fungsi tersebut disebabkan oleh adanya alih fungsi kawasan pangan menjadi non-pangan, lalu ada juga faktor degradasi lahan yang disebabkan pertanian konvensional yang menekankan pada intensifikasi pertanian berbasis mekanisasi dan penggunaan kimia berlebihan. Tidak hanya lahan, tetapi kemampuan mengelola bibit lokal secara turun menurun juga hilang, dampaknya pun mereka terjebak dengan bibit genetik yang tidak mereka produksi, sehingga tidak memiliki kedaulatan atas benih. Di samping itu juga menyebabkan hilangnya diversifikasi pangan yang pada akhirnya menyebabkan kerawanan pangan yang menjurus terancamnya *food sovereignty*.

Transisi pertanian tradisional ke modern dengan ditandai revolusi hijau telah menyebabkan tersisihnya perempuan dalam kerja pertanian, sehingga terjadi diskriminasi yang menyulut ketimpangan gender. Padahal perempuan merupakan pihak yang paling merasakan dampak ketika terjadi kekurangan pangan dan adanya kerusakan ekologis. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, agroekologi merupakan jawaban konseptual atas persoalan kerawanan pangan dan bagaimana menuju *food sovereignty* yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena prinsip agroekologi sejalan dengan ekofeminisme di mana mendorong kedaulatan penuh pangan oleh komunitas, baik kelolanya yang berkeadilan gender dan inklusif. Agroekologi juga mendorong perbaikan atas tanah yang rusak,

⁵⁶ Vandana Shiva, *Reclaiming the Commons: Biodiversity, Indigenous Knowledge, and the Rights of Mother Earth* (Synergetic Press 2020).

mengembalikan keragaman agroekosistem dan kedaulatan atas bibit. Sebab agroekologi merupakan konsepsi yang juga berasal dari pengetahuan lokal yang sudah ada berabad-abad. Maka, konsepsi agroekologi dalam bentuk pertanian regeneratif seperti kembali ke organik dengan prinsip pengelolaan yang adil seperti pada konsep ekofeminisme merupakan alternatif untuk menuju *food sovereignty*.

Daftar Pustaka

- Agarwal B, 'Food Security, Productivity, and Gender Inequality' [2014] Handbook of food, politics and society
- Akram-Lodhi AH, '(Re) Imagining Agrarian Relations? The World Development Report 2008: Agriculture for Development' (2008) 39 Development and Change 1145
- Arora NK, 'Agricultural Sustainability and Food Security' (2018) 1 Environmental Sustainability 217 <<https://doi.org/10.1007/s42398-018-00032-2>>
- Bhattacharyya R and others, 'Soil Degradation in India: Challenges and Potential Solutions' (2015) 7 Sustainability 3528
- BPS, *Executive Summary of Paddy Harvested Area and Production in Indonesia 2019* (2020) <<https://www.bps.go.id/publication/2020/07/10/32247632fa792a2f3f28a644/ringkasan-eksekutif-luas-panen-dan-produksi-padi-di-indonesia-2019.html>>
- Chatfield SL, 'Recommendations for Secondary Analysis of Qualitative Data' (2020) 25 The Qualitative Report 833
- Erdő L, 'Vandana Shiva-Defending Traditional Agriculture', *Green Heroes* (Springer 2019)
- Fox JJ, 'Ecological Policies for Sustaining High Production in Rice: Observations on Rice Intensification in Indonesia' [1993] South-East Asia's Environmental Future: The Search for Sustainability 211
- Gómez LF, Ríos-Osorio LA and Eschenhagen-Durán ML, 'Key Concepts of Agroecology Science. a Systematic Review' (2016) 19 Tropical and Subtropical Agroecosystems 109
- Gomiero T, 'Soil Degradation, Land Scarcity and Food Security: Reviewing a Complex Challenge' (2016) 8 Sustainability 281
- Heaton J, 'Secondary Analysis of Qualitative Data: An Overview' [2008] Historical Social Research/Historische Sozialforschung 33
- Indonesia BPS, 'Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2019'
- Isa I, 'Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian', *Prosiding Seminar Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. A. Dariah, NL Nurida, E. Husen. F. Agus (editor), Bogor* (2006)
- Jahroh S, 'ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN INDONESIA : LESSONS LEARNED FROM ORGANIC FARMING IN WEST' (ISDA 2010)
- Kementerian Pertanian, 'Statistik Lahan Pertanian Tahun 2013-2017' 1 <<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/167-statistik/statistik-lahan>>
- Khairuzzaman MQ, 'Outlook Kementan 2016' (2016) 4 64
- Khudori, 'Kondisi Pertanian Pangan Indonesia' (2010) 19 Pangan 211 <<http://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/141/127>>
- Kinose Y and others, 'Impact Assessment of Climate Change on the Major Rice Cultivar Ciharang in Indonesia' [2020] Journal of Agricultural Meteorology D
- Las I, 'Revolusi Hijau Lestari Untuk Ketahanan Pangan Ke Depan' (2009) 14 Tabloid Sinar Tani
- Leisner CP, 'Climate Change Impacts on Food Security-Focus on Perennial Cropping Systems and Nutritional Value' (2020) 293 Plant Science 110412
- Levien M, 'Gender and Land Dispossession: A Comparative Analysis' (2017) 44 The Journal of Peasant Studies 1111
- Lokadata.id, 'Impor Beras, 2000-2019' (21 Oktober, 2020)

- <<https://lokadata.id/data/impor-beras-2000-2019-1603273725>>
Long-Sutehall T, Sque M and Addington-Hall J, 'Secondary Analysis of Qualitative Data: A Valuable Method for Exploring Sensitive Issues with an Elusive Population?' (2011) 16 *Journal of Research in Nursing* 335
Mariska MA, 'COVID-19 & Its Impacts: Is Indonesia Ready?'
<<http://hdl.handle.net/11540/11920>>
Morshedi L and others, 'The Role of Organic Farming for Improving Food Security from the Perspective of Fars Farmers' (2017) 9 *Sustainability (Switzerland)*
Ngadi N and others, 'Gender Inequality in the Indonesian Labor Market', *Women Empowerment and Well-Being for Inclusive Economic Growth* (IGI Global 2021)
Pal D, 'Ecofeminism: A Study at the Roots of Gender Inequalities', *Scientia Moralitas Conference Proceedings* (Research Association for Interdisciplinary Studies 2021)
PARTASASMITA R and others, 'Impact of the Green Revolution on the Gender's Role in Wet Rice Farming: A Case Study in Karangwangi Village, Cianjur District, West Java, Indonesia' (2019) 20 *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 23
Patel RC, 'Food Sovereignty: Power, Gender, and the Right to Food' (2012) 9 *PLoS medicine* e1001223
Peluso NL, Afiff S and Rachman NF, 'Membuat Alasan Dan Alas Yang Sama Demi Reformasi: Gerakan-Gerakan Agrarian Dan Lingkungan Di Indonesia' (2012) 28 *Wacana* 13
Portman A, 'Food Sovereignty and Gender Justice' (2018) 31 *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 455
Puguh D, Rivera M and Fazri M, "' Covid -19 : Menakar Ketahanan Pangan Di Desa "'
Purwandaru P, Wiyancoko D and Ueda A, 'The Rice Postharvest Utilization Scheme Between Traditional and Post Green Revolution Era in Javanese Community' (2016) 4 *Bulletin of JSSD Vol. 63 No 79*
Reuter T and MacRae G, 'Regaining Lost Ground: A Social Movement for Sustainable Food Systems in Java, Indonesia' [2019] *Anthropology of food*
Rochayati S, Irawan and Husnain, 'Current Status of Organic Farming in Indonesia' [2011] *Indonesian Soil Research* 1
<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/indonesia_organic_farming_2011_IndonesiaDOC.pdf>
Rosset P, 'Re-Thinking Agrarian Reform, Land and Territory in La Via Campesina' (2013) 40 *Journal of Peasant Studies* 721
Rozaki Z, 'COVID-19, Agriculture, and Food Security in Indonesia' (2020)
Salleh A, 'Ecofeminism', *Routledge Handbook of Ecological Economics* (Routledge 2017)
Schanbacher WD, *The Politics of Food: The Global Conflict between Food Security and Food Sovereignty* (ABC-CLIO 2010)
Setyanto P, 'Indonesian Environmental Challenges toward Sustainable Agriculture' 5
Shiva V, *The Violence of the Green Revolution: Third World Agriculture, Ecology and Politics* (Zed Books 1991)
—, *Development, Ecology, and Women* (Routledge 2018)
—, 'Earth Democracy: Sustainability, Justice, and Peace' (2018) 26 *Buff. Envtl. LJ* 1
—, *Reclaiming the Commons: Biodiversity, Indigenous Knowledge, and the Rights of Mother Earth* (Synergetic Press 2020)
Shiva V and Mies M, *Ecofeminism* (Zed Books Ltd 2014)
Sitorus SRP and Pravitasari AE, 'Land Degradation and Landslide in Indonesia' (2017) 1 *Sumatra Journal of Disaster, Geography and Geography Education* 61
Sitthisuntikul K, Yossuck P and Limmirankul B, 'How Does Organic Agriculture

- Contribute to Food Security of Small Land Holders?: A Case Study in the North of Thailand' (2018) 4 Cogent Food & Agriculture
<<http://doi.org/10.1080/23311932.2018.1429698>>
- Smale M, 'The Green Revolution and Wheat Genetic Diversity: Some Unfounded Assumptions' (1997) 25 World development 1257
- Tully K and others, 'The State of Soil Degradation in Sub-Saharan Africa: Baselines, Trajectories, and Solutions' (2015) 7 Sustainability 6523
- Wahyuningsih, 'Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian' (2019) 09 Buletin Konsumsi Pangan 32
- Wheeler T and Von Braun J, 'Climate Change Impacts on Global Food Security' (2013) 341 Science 508
- Winarto YT, "Memanusiakan Manusia'Dalam Lingkungan Yang Tangguh: Mengapa "Jauh Panggang Dari Api"?" [2014] Antropologi Indonesia
- Wingeyer AB and others, 'Soil Quality Impacts of Current South American Agricultural Practices' (2015) 7 Sustainability 2213
- Wollni M and Andersson C, 'Spatial Patterns of Organic Agriculture Adoption: Evidence from Honduras' (2014) 97 Ecological Economics 120
- Yunus A and others, 'Sociotechnical Change and Institutional Adjustment in Paddy Rice Farming during Post Green Revolution in Indonesia' (2016) 4 International Journal of Agriculture System 218